

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KARTU KEPEMILIKAN KOPERASI UNIT DESA
(Studi Kasus di Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah sebagai
Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Serjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah*



Oleh:

TUTI UNANI

1413030444

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
b1439 H/ 2018 M**

HALAMAN PENGESAHAN

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KARTU KEPEMILIKAN KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus di Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara)", disusun oleh saudari **Tuti Unani, NIM. 1413030444** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang,

Tanggal : 06 Agustus 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasah

Dr. H. Muchlis Bahar

NIP. 195901271992031001

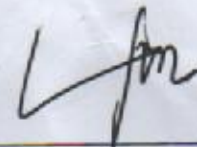
Penguji I



Dra. Yurni, M.Pd

NIP. 196301011999032001

Penguji II



Dra. Nailul Rahmi, M. Ag

NIP. 196608211992032011

Penguji III/Pembimbing I



Yovidal Yazid, S. HI, MH

NIP. 198003032008011021

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Delegasi Fakultas syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dra. Eftikhadi, M.Ag
NIP. 197407191998031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KARTU KEPEMILIKAN KOPERASI UNIT DESA (Studi Kasus di Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)**. Ditulis oleh **Tuti Unani NIM 1413030444**. Maksud dari judul secara umum adalah suatu tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan jual beli kartu koperasi unit desa dengan tujuan untuk menjual kavling plasma yang masyarakat miliki yang dilakukan oleh masyarakat Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Batahan banyak yang memperjualbelikan kartu koperasi unit desa dengan tujuan untuk memperjualbelikan kavling plasma yang dimiliki oleh masyarakat Batahan. Dalam bermuamalah harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh selagi belum ada dalil yang melarangnya.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kartu kepemilikan koperasi unit desa (studi kasus di Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). Dalam mengumpulkan dan mendapatkan data, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara langsung turun ke lapangan. Sumber data primernya berupa data yang diperoleh dari responden pada masyarakat Batahan yaitu dari penjual dan pembeli, pengurus koperasi, serta tokoh masyarakat dan alim ulama yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data skundernya penulis peroleh dari akun jual beli, AD/ART koperasi unit desa dan perjajian antara koperasi unit desa dengan pihak PTPN IV yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan jalan mengklasifikasikan data tersebut, kemudian data diuraikan sedemikian rupa hingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kartu koperasi unit desa yang dilakukan oleh masyarakat Batahan, pelaksanaan yang ditemui dilapangan ternyata masyarakat tidak bertujuan untuk menjual kavling plasmanya melainkan mengalihkan hak peserta keanggotaan sebagai kepemilikan kavling plasma, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam *surat pernyataan* tentang pengalihan hak anggota koperasi dari pihak pertama kepada pihak kedua yang telah ditandatangani oleh pengurus. Adapun yang menyangkut perpindahan hak dari pihak penjual kepada pihak pembeli sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam surat keterangan pengalihan hak anggota koperasi dan surat pernyataan yang tercantum pada poin pertama "bahwa hak saya sebagai anggota KUD pasar baru Batahan yang telah saya lepaskan benar milik saya". Jadi jika ditinjau dari hukum Islam jual beli kartu koperasi unit desa yang dilakukan oleh masyarakat Batahan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.